

## LAPORAN SINGKAT

**KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)**

=====

Tahun Sidang : 2006-2007  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : RDP Komisi I DPR-RI dengan KASAL  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Pebruari 2007  
Pukul : 13.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga  
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1  
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat  
2. Penjelasan oleh KASAL  
3. Tanya jawab  
4. Penutup.  
Hadir Anggota : 42 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : KASAL, Sdr. Laksamana TNI Slamet Subiyanto beserta jajarannya.

### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KASAL pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **II KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendukung tindakan tegas KASAL terhadap pelaku-pelaku *illegal logging*, *illegal fishing*, dan segala bentuk penyelundupan, termasuk ekspor pasir ilegal yang diduga dimanfaatkan untuk memperluas wilayah Singapura yang menjorok ke arah Indonesia serta minta KASAL untuk meningkatkan penjagaan, pengamanan dan operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan.

2. Komisi I DPR RI akan mengajak alat kelengkapan DPR RI terkait untuk mengadakan Rapat Kerja bersama dengan Mabes TNI/TNI-AL dan instansi Pemerintah terkait untuk membahas operasi penegakan hukum dan proses hukum terhadap *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan pasir terutama menyangkut permasalahan yang sering timbul, yaitu para pelaku dan kapal yang ditangkap sering divonis hukum ringan.
3. KASAL sepakat dengan Komisi I DPR RI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan oleh masyarakat, khususnya kalangan purnawirawan TNI-AL mengenai permasalahan penghunian rumah, dan persoalan tanah, seperti antara lain di Grati-Pasuruan, Probolinggo, Jelebuk, dan Ujung Surabaya, dengan pendekatan dialog, manusiawi, dan penegakan hukum serta penghargaan yang wajar kepada para penghuni purnawirawan TNI-AL termasuk pemberian fasilitas yang memungkinkan mereka memperoleh tempat penghunian. Untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut, Komisi I DPR RI minta agar KASAL mengusulkan dukungan anggaran yang diperlukan dalam APBN Mabes TNI-AL.
4. Komisi I DPR RI minta TNI-AL agar dalam rencana pembelian alutsista strategis ke depan, terlebih dahulu dibahas secara mendalam dengan Dephan dan Mabes TNI dengan mengacu pada kebutuhan pertahanan, melalui proses perencanaan dan pembelian yang transparan dan akuntabel serta dilakukan pembahasan dengan Komisi I DPR RI.
5. Komisi I DPR RI menugaskan Panitia Anggaran dan Kelompok Kerja Pertahanan Komisi I DPR RI untuk mendalami realisasi pengadaan alutsista TNI-AL, seperti Helikopter MI-2 dan Rudal Yakhont serta masalah-masalah di sekitar proses pengadaan tersebut, untuk dicarikan solusi yang terbaik bagi kelanjutan pengadaan alutsista tersebut.
6. Dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasannya, Komisi I DPR RI minta KASAL memberikan penjelasan secara rinci dan tertulis mengenai rencana pengadaan alutsista yang didukung oleh anggaran Kredit Ekspor Tahun 2005-2009, bagaimana posisinya sekarang ini, dan apakah sudah ada yang terealisasi, serta kendala-kendala apa yang dihadapi.
7. Komisi I DPR RI mendukung upaya-upaya TNI-AL untuk meningkatkan daya kemampuan penangkalan dan *deterrent* TNI-AL dalam rangka memperkuat posisi pertahanan di seluruh kawasan kepulauan Indonesia. Untuk itu, perlu diprioritaskan perlengkapan alutsista TNI-AL yang meningkatkan kemampuan deteksi, penangkalan, dan pengejaran di laut dengan memberi fungsi yang optimal pada operasi kapal selam. Berkaitan dengan itu, penguatan kemampuan TNI-AL perlu dilakukan dengan perpaduan antara pengadaan alutsista dan kebutuhan kritis peningkatan kemampuan SAR nasional, dengan peralatan yang berfungsi ganda seperti halnya pengoperasian helikopter berkemampuan teknologi tinggi (misalnya Super Linx yang dimiliki Angkatan Laut Malaysia dan sebagainya) antara lain guna operasi penyelamatan para korban bencana dengan tingkat kecepatan yang tinggi.

8. Sehubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kondisi RS yang dibawah TNI-AL kondisinya tidak layak lagi, seperti antara lain RS Dr. Ramelan-Surabaya dan RS AL Mintohardjo-Jakarta, dimana kondisi sarana dan prasarana tidak memadai serta peralatan yang sudah tua. Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI minta KASAL agar membenahi Rumah Sakit-Rumah Sakit TNI-AL untuk menopang kesejahteraan TNI-AL dan minta KASAL untuk mengalokasikan dan mengusulkan anggaran guna pembenahan RS TNI-AL tersebut.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 18.35 WIB.

KETUA,

**THEO L. SAMBUAGA**